
Pengaruh *E-Procurement* dan Akuntabilitas Terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

Wulan Riyadi¹, Nadia Hasanah²

¹²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

ABSTRAK

Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa merupakan masukan dan keluaran barang/jasa yang dihasilkan dengan masukan dan keluaran yang langka dalam satuan unit kerja atau ketetapan cara dalam melakukan sesuatu yang tidak membuang-buang waktu, tenaga serta biaya. Praktik manajemen kinerja pemerintah daerah itu dihadapkan pada implementasi yang lambat, permasalahan dalam pengadaan barang/jasa tidak akan terjadi jika manajemen memahami dan melaksanakan sepenuhnya prinsip dasar pengadaan barang/jasa. Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sesuai dengan surat edaran dari pimpinan daerah, menerapkan proses pengadaan barang/jasa berbasis online guna meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa, serta memperbaiki sistem manajemen pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Staff Dinas Pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah Staff Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikasi yang dilakukan dengan bantuan software komputer yaitu Spss versi 29. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa *E-Procurement* berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa, dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa. Secara simultan menunjukkan bahwa *E-Procurement* dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jas.

Kata Kunci: E-Procurement; Akuntabilitas; Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRACT

Efficiency of Procurement of Goods/Services is the input and output of goods/services produced with scarce input and output in work units or the determination of how to do something that does not waste time, energy and costs. The Education Office of Majalengka Regency in accordance with the circular from the regional leader, implements an online-based procurement process of goods/services in order to streamline the procurement of goods/services, and improve the government management system. The research method used in this study is a quantitative method with a descriptive and verification analysis approach. The population in this study is the Education Office Staff. The sample in this study is the Procurement Staff of Goods/Services at the Education Office of Majalengka Regency. The method used in this study is descriptive and verification analysis carried out with the help of computer software, namely Spss version 29. The results of this study partially show that E- Procurement has an effect on the Efficiency of Procurement of Goods/Services, and Accountability has an effect on the Efficiency of Procurement of Goods/Services. Simultaneously shows that E- Procurement and Accountability have an effect on the Efficiency of Procurement of Goods/Services.

Keywords: E-Procurement; Accountability; Efficiency of Goods/Services Procurement

PENDAHULUAN

Menurut Hamkah (2020), Pembangunan di Indonesia yang semakin meningkat, telah diikuti oleh bertambah besarnya penggunaan dana yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dana yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. hal ini memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari Pengguna dalam rangka menghindari adanya akibat kerugian bagi negara. Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian, Lembaga, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah (Yatiningrum & Tyas, 2022).

Berdasarkan dari surat edaran Sekertariat Daerah Kabupaten Majalengka, (2023) Nomor: PG.00.01.02/1268/PBJ mengenai Himbauan Belanja Pengadaan melalui *E-Catalogue*. Pada beberapa daerah yang ada di Indonesia sistem *E-Procurement* ini sudah diterapkan guna pengadaan barang/jasa di sistem pemerintahan. Dinas Pendidikan Majalengka serta seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Majalengka mengimplementasikan metode *E-Procurement* pada tahun 2023, hal ini dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik yang mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2020 Tentang unit Kerja Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, *E-Procurement* adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum tujuan digalakkannya *E-Procurement* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa. Menurut Sutedi & Adrian (2012), melalui *E-Procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/ transparansi dan juga meminimalisir praktik curang atau KKN. Dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan negara.

E-Procurement termasuk salah satu alat pengadaan barang/jasa yang berbasis online yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam mengontrol pengeluaran instansi pemerintah sampai akhirnya juga diharapkan oleh banyak pihak dapat menciptakan tata kelola pemerintah yang baik pada sektor pemerintahan seperti meningkatkan efesiensi dan akuntabilitas.

Menurut Erryana (2016), akuntabilitas diyakini dapat memperbaiki kondisi pemerintahan untuk mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai sistem pemerintahan yang demokratis. Indonesia-pun telah mengatur sistem pengukuran kinerja pemerintah pusat dan daerah sejak Inpres No. 7 dikeluarkan pada tahun 1999. Instruksi Presiden mensyaratkan dilaksanakan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. SAKIP ialah serangkaian kegiatan, alat, dan prosedur sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengumpulkan data serta mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan kinerja lembaga pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerjanya (Peraturah Presiden, 2014). Tercapainya tujuan untuk pertanggungjawaban publik dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah terbentuknya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik (Habibi & Untari, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Dalam Parinding (2020), Menurut Mitchell (1996) Teori kepatuhan menyatakan bahwa perilaku seseorang atau elemen organisasi (actors) adanya

perjanjian (traty), kepatuhan merupakan konsekuensi yang mengharuskan actors untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang disepakati atau yang diberlakukan. Hal ini didukung oleh Abdillah dkk. (2019) yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan memiliki kewenangan untuk mendikte atau mengatur perilaku individu atau organisasi. Menurut Agustina (2019), bahwa melalui pengadaan barang/jasa yang baik, maka pemerintah dapat menciptakan sarana prasarana penunjang yang baik pula dan diharapkan public goods yang tercipta dapat diterima masyarakat dengan maksimal. Pemerintah mengharapkan melalui public goods yang baik maka rakyat dapat melakukan berbagai kegiatan ekonomi dengan aman dan nyaman sehingga perekonomian negara dapat berkembang. Sebaliknya, apabila pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tidak maksimal maka akan dihasilkan pelayanan pada publik yang tidak maksimal pula. Sehingga dalam penelitian ini, efesiensi dalam pengadaan barang/jasa adalah segala tindakan aparaturnegara dalam mempertanggungjawabkan segala proses pengadaan barang/jasa.

E-Procurement

E-Procurement Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012, EProcurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Djoyosoekarto (2008:10) mengidentifikasikan EProcurement sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian. Menurut Sutedi & Adrian (2012:254) E-Procurement sebagai sebuah website yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaan-nya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. Dukungan Teknologi Informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Governmet dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektifitas dan efisiensi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas Menurut Mursyidi (2013) Akuntabilitas ialah suatu cara adanya pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Sujarweni (2015) Akuntabilitas ialah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. A. Halim (2012), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Efesiensi Pengadaan Barang/Jasa

Mengutip dari Wikipedia, (2023) Istilah efesien berasal dari bahasa latin “efficere” yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. menurut suatu pengertian tertentu efesiensi dapat diartikan sebagai upaya memaksimalkan perbandingan antara hasil bersih yang nyata dengan pengorbanan yang diberikan. Suatu tindakan dapat dikatakan efisien jika mencapai hasil yang maksimum dengan usaha tertentu yang diberikan, atau apabila mecapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha terkecil yang mungkin diberikan. 48Mulyadi (2007:63) menjelaskan bahwa efisiensi adalah ketepatan dalam cara atau usaha untuk melaksanakan sesuatu tanpa menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan biaya. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai rasio antara input dan output atau antara biaya dan keuntungan. Dengan kata lain, efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara keluaran (output) atau hasil barang/jasa yang dihasilkan dengan masukan (input) dalam

satuan unit kerja, serta merupakan metode yang tepat untuk melakukan sesuatu tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya secara berlebihan. Efisiensi dari pandangan ekonomi timbul jika dimanfaatkan dengan baik, sehingga mendapatkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis regresi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, objek penelitian yaitu staff pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Teknik pengumpulan sampling dengan metode *purposive sampling*, sampel dalam penelitian ini adalah pengelola barang/jasa di Dinas Pendidikan Majalengka sebanyak 42 orang responden. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Berikut ini hasil uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS:

Tabel 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,09492370
Most Extreme Differences	Absolute		,133
	Positive		,096
	Negative		-,133
Test Statistic			,133
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			,061
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		,060
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,054
		Upper Bound	,067

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 926214481.

Sumber : Output SPSS versi 29 data diolah sendiri (2024)

Pada tabel 4.16 diatas, diketahui bahwa Asymp. Sig pada uji Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,061 > 0,05 (5%). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. ini menyajikan hasil dan pembahasan. Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Uji Multikolineritas

Tabel 2 Uji Multikolineritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>E-Procurement</i>	,295	3,395
	Akuntabilitas	,295	3,395

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Output SPSS versi 29 data diolah sendiri (2024)

Pada tabel 4.17 diatas, diketahui bahwa hasil perhitungan variabel independen yang memiliki nilai tolerance 0.295 untuk *E-Procurement*, 0,295 untuk Akuntabilitas. Maka nilai tolerance semua variabel independen lebih besar dari 0,1. Kemudian, hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 3,395 untuk *E-Procurement*, 3,395 untuk Akuntabilitas. Maka nilai VIF dari semua variabel independen kurang dari 10. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi sempurna antar variabel bebas atau dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,737	4,534		1,706	,096
	<i>E-Procurement</i>	,232	,139	,272	1,669	,103
	Akuntabilitas	,473	,131	,591	3,622	<,001

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa

Sumber : Output SPSS versi 29 data diolah sendiri (2024)

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji t)

No.	Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig
1	<i>E-Procurement</i>	2,049	2,02269	0,047
2	Akuntabilitas	3,319	2,02269	0,002

Sumber : Output SPSS versi 29 data diolah sendiri (2024)

Pembahasan

Pengaruh *E-Procurement* terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa

Hasil penelitian dari pengaruh *E-Procurement* terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki skor indikator tertinggi ialah indikator E-Tendering, dimana hal tersebut membuktikan bahwasannya pada penerapan dalam pengadaan barang/jasa ini telah terjadi proses tawar-menawar antara pejabat pengadaan dengan penyedia agar terjadi pemanfaatan anggaran yang baik, proses tawar-menawar dilakukan berdasarkan satuan harga yg telah ditentukan oleh pemerintah daerah, serta penandatanganan kontrak pekerjaan dilakukan ketika sudah mencapai harga persetujuan kedua belah- pihak. Hal ini menunjukkan bahwa E-Tendering pada variabel *E-Procurement* terhadap Efisiensi Barang/Jasa ini berpengaruh positif dan sejalan dengan teori kepatuhan.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa

Penerapan prinsip akuntabilitas terhadap Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka termasuk dalam kategori baik. Indikator dari variabel akuntabilitas yang memiliki poin tertinggi ialah indikator tercapainya tujuan, dimana konsep anggaran yang terukur dengan baik akan membawa banyak manfaat baik, merealisasikannya-pun akan terasa lebih mudah. Indikator ini dalam variabel akuntabilitas mempunyai peran penting, karena salah satu tujuan pelaksanaan program-program serta realisasi anggaran dari suatu instansi/organisasi ialah untuk mendapatkan manfaat.

Pengaruh *E-Procurement* dan Akuntabilitas terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/ Jasa

Staff Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka memberikan pertanggungjawaban sejalan dengan prinsip, nilai, dan tujuan instansi yang berpedoman terhadap peraturan-peraturan sistem pemerintahan, serta indikator kinerja terdefinisi dengan jelas. Pelaksanaan implementasi *E-Procurement* yang disertai prinsip akuntabilitas yang baik akan membawa pengaruh positif untuk efisiensi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengaruh *E-Procurement* dan Akuntabilitas terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *E-Procurement* berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa. Artinya pengampliasian sistem *E-Procurement* ini dapat meningkatkan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sehingga meningkatkan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
3. *E-Procurement* dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaplikasian sistem *E-Procurement* yang dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja pada Dinas Pendidikan Majalengka dapat meningkatkan efisiensi Pengadaan Barang/Jasa

Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. *E-Procurement* berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa, guna meningkatkan efektifitas dari sistem Pengadaan Barang/Jasa ini, hendaknya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan pada sistem *E-Procurement*. Agar dapat mengoptimalkan sistem *E-Procurement* dengan lebih baik lagi. Jadi, seluruh proses pengadaan dari mulai perencanaan, realisasi belanja, hingga hasil yang akan dijadikan bahan evaluasi-pun dapat dilihat dalam satu sistem.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa, agar dapat senantiasa meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa, maka penekanan pada perencanaan pengadaan harus dilakukan, agar indikator kinerja pada setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran terukur dengan jelas.
3. *E-Procurement* dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa, agar dapat meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa, maka evaluasi realisasi perencanaan harus dapat ditingkatkan lagi, dikarenakan hasil evaluasi dari realisasi anggaran periode sebelumnya sebagai acuan dari realisasi anggaran. Penyerapan anggaran yang sesuai dengan sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, Sistem dalam pengadaan barang/jasa telah berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Erryana, Vinda, Setyawan, & Hendri. (2016). *Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah)*. 5.
- Habibi, M. M., & Untari, S. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. 3, 159–168. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Hamkah. (2020). *Etika Pengadaan Barang / Jasa*.
- Lubis, A. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa*. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan->

malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-016149#:~:text=Efisien maksudnya adalah pengadaan barang,sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama.

Peraturan Presiden. (2014). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. (2012).
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/save/14928>

Sutedi, & Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya* (Vol. 2). Sinar Grafika.

Yatiningrum, A., & Tyas, Y. I. W. (2022). *Pengaruh implementasi E-Procurement dan akuntabilitas terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pada dinas perhubungan kabupaten probolinggo*. 5(2), 2153–2165. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.763>